

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483km<sup>2</sup> atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan menjadikan negara ini salah satu negara yang dunia maritimnya paling berkembang pesat, hal tersebut dapat dilihat makin ramainya lalu lintas pelayaran Internasional baik kapal yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia tidak hanya itu saja pelayaran nasional dan lokal juga tidak kalah berkembangnya kini banyak sekali kapal – kapal yang melakukan pelayaran untuk menuju ke berbagai pulau baik jenis kapal barang maupun kapal penumpang.

Pertumbuhan dunia maritim memang dirasa sangatlah bagus karena dengan berkembangnya dunia maritim di Indonesia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan laut merupakan media paling penting dalam kegiatan ekspor impor jadi bisa dikatakan pelabuhan merupakan pintu gerbang suatu negara.

Dunia pelayaran memang sangatlah luas tidak hanya perpindah kapal dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain, tetapi masih banyak lagi seperti Hidrografi, Penjagaan pantai, ekspor impor, Perdagangan, Kenavigasian dan lain–lain.

Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelagu State*) oleh konfensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya. Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan

hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Laut sebagai jalur komunikasi (*sea lane on communication*) diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu – lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu di tentukan alur perlintasan laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun Internasional serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Bengkel Kenavigasian, Survey Hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang aman serta infrastruktur lainnya. Pengatur alur lalu – lintas dan perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah dan kita bersama sebagai penguasa, pengelola, serta pengguna atas laut.

Sesuai dengan UU Nomor 17 tentang Pelayaran bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Segala kegiatan kepelabuhan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan sendiri merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan di Cilacap sendiri kepelabuhan dilaksanakan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam hal mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, ketertiban di pelabuhan. Kegiatan kepelabuhan yang dijalankan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan memang sangatlah penting karena kegiatan kepelabuhan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan internasional merupakan pelabuhan terbesar yang melayani arus bongkar muat barang, hewan dan penumpang baik dalam negeri maupun luar negeri terdiri atas ratusan perusahaan masing-masing bergerak dibidang angkutan laut nasional, Keagenan / Representative Agent, Perusahaan Bongkar Muat, dan Perusahaan-perusahaan yang terkait lainnya sebagai penunjang angkutan laut sehingga sebagai pemegang fungsi koordinasi, Kantor Syahbandar diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam upaya pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan disektor transportasi laut. Seperti kita ketahui di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap yang merupakan salah satu pelabuhan yang paling ramai lalu – lintas pelayarannya.

Untuk itulah penulis dalam menyusun Karya Tulis ini mengambil Judul :  
“Peranan Kantor Kesyahbandaran Cilacap Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Angkutan Laut”

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa tugas dan fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai ?
2. Mengapa perlu diadakan patroli dan penjagaan di sekitar pelabuhan?
3. Bagaimana prosedur tata cara pengawasan pelabuhan ?

### **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Pada saat melaksanakan praktek darat, penulis akan membandingkan antara teori – teori, praktek secara langsung dan studi kepustakaan. Sehingga penulisan karya tulis ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Tugas dan fungsi kesatuan laut penjagaan laut dan pantai.
- b. Untuk Mengetahui Perlu diadakan patroli dan penjagaan di sekitar pelabuhan.
- c. Untuk Mengetahui Prosedur dan tata cara pengawasan pelabuhan.

#### **2. Kegunaan Penulisan**

##### **a. Bagi Penulis**

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama tentang Patroli dan Penjagaan Laut dan Pantai dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran.

##### **b. Bagi Dunia Akademis**

Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Patroli dan Penjagaan Laut dan Pantai, sehingga bisa memacu semangat para akademis untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.

##### **c. Bagi Pembaca**

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi karya tulis selanjutnya serta sebagai pengetahuan bagi pembaca tentang Patroli dan Penjagaan Laut dan Pantai dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar dapat diperoleh suatu penyusunan dan pembahasan karya tulis yang sistematis, terarah pada objek masalah yang dipilih, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar Karya tulis ilmiah ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **Bab 1. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang tujuan penulisan, yaitu mengapa alasan penulis membuat karya tulis ilmiah dengan judul “Peranan Kantor Syahbandar Cilacap Dalam Pengawasan Serta Pembinaan Angkutan Laut”. Selain itu penulis juga membuat latar belakang masalah, yaitu masalah apa saja yang di hadapi dalam proses pengawasan serta pembinaan kepada perusahaan angkutan laut.

##### **Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka, yaitu penulis meninjau kembali hal hal yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, dalam karya tulis ini penulis mengartikan, dan menjelaskan kata kata inti dalam karya tulis ilmiah ini.

##### **Bab 3. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam bab ini penulis meguraikan mengenai metode penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap dalam melaksanakan pengawasan serta pembinaan kepada Perusahaan Angkutan Laut.

##### **Bab 4. PEMBAHASAN DAN HASIL**

Dalam bab ini penulis membuat metode penelitian, yaitu tata cara bagaimana cara penelitian akan di laksanakan. Pada bab 4 ini urutan dalam

penyusunan karya tulis ini yaitu gambaran umum mengenai lokasi tempat penulis melaksanakan prada.

## Bab 5. PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran saran. Penulis karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.